



## LANDASAN HISTORIS PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) DI KALIMANTAN SELATAN: TRASFORMASI DARI TRADISI PESANTREN KE KURIKULUM NASIONAL

Bashiratud Diyana Basy<sup>1</sup>, Salamah<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

<sup>1</sup>[bashiratuddiyana20@gmail.com](mailto:bashiratuddiyana20@gmail.com), <sup>2</sup>[salamah@uin-antasari.ac.id](mailto:salamah@uin-antasari.ac.id)

### Abstract

*This study examines the historical transformation of Islamic Religious Education (PAI) in South Kalimantan, focusing on how pesantren institutions responded to the implementation of the National Curriculum policy. Historically, PAI in the region was dominated by autonomous salaf pesantren traditions centered on kitab kuning studies and the authority of the Tuan Guru. State intervention following independence, particularly the 1975 Joint Decree of Three Ministers (SKB 3 Menteri), required pesantren to adopt the national curriculum for formal recognition, creating institutional challenges. This research employs a qualitative approach using library research and historical analysis. The findings reveal that pesantren responses did not reflect total resistance or full assimilation, but rather a process of curricular negotiation. This negotiation resulted in two hybrid models: the historical adaptation (dual-system) model, which maintains traditional learning while adopting formal educational structures, and the modern integration model, which incorporates the national curriculum alongside traditional content from the outset. The study concludes that this hybrid consensus enables pesantren to preserve religious identity while securing formal legitimacy and socio-economic mobility for students.*

**Keywords:** Historical Foundation; Islamic Religious Education; Educational Transformation; National Curriculum.

### Abstrak

*Penelitian ini menganalisis proses transformasi historis Pendidikan Agama Islam (PAI) di Kalimantan Selatan dengan menyoroti dinamika respons lembaga pesantren terhadap penerapan kebijakan Kurikulum Nasional. Secara historis, PAI di Kalimantan Selatan didominasi oleh tradisi pesantren salaf yang otonom, berpusat pada otoritas Tuan Guru dan kajian kitab kuning. Intervensi negara pascakemerdekaan, khususnya melalui kebijakan SKB Tiga Menteri tahun 1975 yang mensyaratkan adopsi kurikulum umum untuk pengakuan formal, menimbulkan dilema kelembagaan bagi pesantren. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka dan analisis historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa respons pesantren tidak bersifat asimilatif maupun resistif secara total, melainkan melalui proses negosiasi kurikuler. Proses ini melahirkan dua*

model pendidikan hibrid, yaitu model adaptasi historis (sistem ganda) yang mempertahankan tradisi pembelajaran kitab kuning sekaligus mengadopsi struktur pendidikan formal, serta model integrasi modern yang sejak awal menggabungkan kurikulum nasional dengan konten tradisional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa konsensus hibrid tersebut memungkinkan pesantren mempertahankan identitas keagamaan sekaligus memperoleh legitimasi formal dan mobilitas sosial-ekonomi bagi santri.

**Kata Kunci:** *Landasan Historis; Pendidikan Agama Islam; Transformasi Pendidikan; Kurikulum Nasional.*

## PENDAHULUAN

Pendidikan Agama Islam (PAI) telah melalui sejarah panjang yang penuh dengan dinamika di Indonesia. Dinamika sejarah ini diwarnai dengan perdebatan, tawar-menawar, dan penyesuaian antara dua kubu utama, yaitu tradisi dan modernitas<sup>1</sup>. Kubu tradisi direpresentasikan oleh sistem pendidikan pesantren sebagai lembaga pendidikan islam yang asli tumbuh di Indonesia secara otonom dengan Kiai sebagai pemangku otoritas dan fokus utamanya adalah memperdalam ilmu agama (*tafaqquh fiddin*)<sup>2</sup>. Lebih jauh, fokus utamanya dituangkan dalam kurikulum yang sifatnya transmisi dan mengkaji kitab-kitab kuning (*kutub al-turats*), dengan tujuan meregenerasi ulama dan menjaga keotentikan tradisi keilmuan islam<sup>3</sup>.

Berbeda halnya dengan kubu modernitas yang hadir dalam bentuk intervensi negara pasca kemerdekaan. Negara memiliki kepentingan ideologis untuk menciptakan warga negara yang religious dan juga nasionalis, sehingga perlu adanya standarisasi dan integrasi<sup>4</sup>. Perwujudan Pancasila sebagai dasar negara yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 menjadi tujuan utama dalam pendidikan. Sehingga, intervensi negara dalam mengatur pendidikan, khususnya pendidikan agama islam dapat kita rasakan hingga saat ini, yang mana terdapat dualisme berbeda antara pendidikan agama di bawah Kementerian Agama dan pendidikan umum di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Upaya negara untuk mengintervensi dan mengatur pendidikan Islam ini melahirkan apa yang sering disebut sebagai "dualisme" sistem pendidikan<sup>5</sup>. Dualisme ini, yang memisahkan "pendidikan agama" (di bawah Kemenag) dan "pendidikan umum"

<sup>1</sup> Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: tradisi dan modernisasi di tengah tantangan milenium III* (Prenada Media, 2019).

<sup>2</sup> Zamakhsyari Dhofier, "Tradisi pesantren: Studi tentang pandangan hidup kyai," (*No Title*), 1982.

<sup>3</sup> Karel A Steenbrink, "Pesantren, madrasah, sekolah: pendidikan Islam dalam kurun moderen," (*No Title*), 1986.

<sup>4</sup> H Abuddin Nata, *Manajemen pendidikan: Mengatasi kelemahan pendidikan Islam di Indonesia* (Kencana, 2012).

<sup>5</sup> Muhammad Kholik dan others, *Politik Pendidikan Islam* (AE Publishing, 2025).

(di bawah Kemdikbud), menjadi arena negosiasi politik yang panjang dalam sejarah PAI di Indonesia<sup>6</sup>.

Transformasi PAI modern yang paling signifikan bisa dikatakan terjadi pada masa orde baru. Terbit Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri (Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, serta Menteri Dalam Negeri) pada tahun 1975, dengan tujuan meningkatkan mutu pendidikan madrasah<sup>7</sup>. Kebijakan ini memberikan pengakuan (rekognisi) yang telah lama diperjuangkan, yaitu penyetaraan nilai ijazah madrasah (MI, MTs, MA) dengan sekolah umum (SD, SMP, SMA)<sup>8</sup>. Akan tetapi, pengakuan ini memberikan syarat bahwa madrasah diharuskan mengadopsi kurikulum nasional dengan proporsi yang dominan 70% pelajaran umum dan hanya 30% pelajaran agama. Hal ini memberikan imbas kepada madrasah yang seolah-olah keluar dari lingkup pendidikan agama murni, namun terintegrasi dalam kerangka kurikulum nasional<sup>9</sup>.

Penetrasi Kurikulum Nasional ini kemudian dikukuhkan secara legal-formal melalui Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) No. 2 Tahun 1989. Inilah yang menjadi payung hukum pertama, yang secara definisinya menjadikan Pendidikan Agama (termasuk PAI) sebagai mata pelajaran wajib pada setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan di Indonesia<sup>10</sup>. Selanjutnya, posisi PAI semakin diperkuat melalui UUSPN No. 20 Tahun 2003, yang menegaskan fungsi pendidikan agama untuk membentuk manusia yang beriman dan bertakwa<sup>11</sup>. Kebijakan-kebijakan inilah yang kemudian menjadi motor penggerak transformasi kelembagaan pendidikan islam di seluruh Indonesia, dimulai dari Surat Keputusan Bersama tahun 1975 hingga UUSPN 2003.

fenomena transformasi otonomi dari otoritas sistem pesantren ke standarisasi negara mendapatkan respon yang beragam di berbagai daerah Indonesia. Respon ini bergantung pada kekuatan akar tradisi dan sejarah sosial-politik di masing-masing wilayah. Hal ini bisa dilihat pada pondok pesantren Darussalam Martapura, yang mana pada saat SKB 3 menteri diterbitkan tepatnya setelah tahun 1975, terjadi beberapa

<sup>6</sup> Amrullah Amrullah, "Eksistensi Pendidikan Islam di Era Perkembangan Teknologi dan Informasi," *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI* 9, no. 2 (2022): 234–47, <https://doi.org/https://doi.org/10.69896/modeling.v9i2.1241>; Zulkifli Zulkifli, M Khatami, dan others, "Negosiasi Pendidikan Islam Dan Teknologi Terhadap Perubahan Global 'Sebuah Responisasi Terhadap Era Revolusi Industri 4.0,'" *Darajat: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 6, no. 2 (2023): 103–12, <https://doi.org/https://doi.org/10.58518/darajat.v6i2.1821>.

<sup>7</sup> Salman Alfarisi dan Yunus Abu Bakar, "SKB 3 menteri dan implikasinya pada pendidikan Islam," *Al-Fikr: Jurnal Pendidikan Islam* 8, no. 1 (2022): 1–9.

<sup>8</sup> Samsul Nizar, *Sejarah Pendidikan Islam : Menelusuri Jejak Sejarah Pendidikan Era Rasulullah Sampai Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007).

<sup>9</sup> Achmad Audi Pratama Jojang Audi dkk., "Perkembangan dan Problematika Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Indonesia," *Risâlah Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 10, no. 4 (2024): 1648–64.

<sup>10</sup> Republik Indonesia, "Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional" (1989).

<sup>11</sup> Republik Indonesia, "Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional" (2003).

perubahan system pembelajaran. SKB 3 menteri diterbitkan pada saat kepemimpinan KH. Anang Sya'rani Arief (1959 s/d 1969) dan KH. Salim Ma'ruf (1968 s/d 1976), perkembangan penting terjadi di mana ditetapkan jenjang pendidikan *tahdiriyah* 2 tahun, *awaliyah* 4 tahun, *tsanawiyah/wustha* 3 tahun, dan *Aliyah/ulya* 3 tahun. Terbentuknya lembaga khusus mempersiapkan guru agama (semacam PGA) yang disebut "*Isti'dadul Mu'allimin Darussalam*" 6 tahun dengan memasukkan pola kurikulum pelajaran umum di dalamnya. Selanjutnya ketika kepemimpinan KH. Badruddin (1976 s/d 1992), modernisasi pesantren Darussalam terus berlangsung. Pesantren Darussalam tidak hanya mendirikan lembaga pendidikan Islam madrasah, tapi juga pendidikan umum seperti SMP, SPP-SPMA, dan STM/SMK. Di sinilah konteks Kalimantan Selatan menjadi studi kasus yang unik dan menarik. Selain daerah Jawa, Kalimantan Selatan sendiri juga dikenal sebagai salah satu wilayah yang kuat islam tradisionalnya. Hal ini menjadikan Kalimantan Selatan memiliki identitas keagamaan yang sering disebut sebagai "Islam Banjar"<sup>12</sup>. Karakteristik utama "Islam Banjar" adalah terbangunnya "Jejaring Ulama Banjar" yang sangat kuat dan dihormati, yang telah membangun sistem pendidikannya sendiri (model *halaqah* dan pesantren) jauh sebelum intervensi negara modern<sup>13</sup>.

Salah satu pusat dari tradisi keilmuan Banjar yang dapat dijadikan sebagai contoh adalah Pondok Pesantren Darussalam Martapura. Pondok Pesantren Darussalam Martapura menjadi pondok pesantren tertua di Kalimantan Selatan, yang didirikan pada tahun 1914. Darussalam menjadi representasi dari tradisi pesantren di Kalimantan Selatan, yang puluhan tahun menjalankan sistem pendidikan yang mempelajari kitab-kitab kuning dengan berfokus pada kaderisasi ulama<sup>14</sup>. Ketika kebijakan Kurikulum Nasional (khususnya pasca 1975) muncul, lembaga-lembaga pesantren menghadapi dilema bagaimana merespon tuntutan negara tersebut. Hal ini menyebabkan sistem pendidikan pesantren dihadapkan pada pilihan antara mempertahankan tradisi pesantren yang telah ada atau beradaptasi dengan modernitas<sup>15</sup>, tak terkecuali juga di Kalimantan Selatan.

Berbagai penelitian mutakhir (2020-2025) telah mengkaji model adaptasi pesantren di Kalsel. Studi menunjukkan bahwa integrasi nilai Islam dan kebangsaan di pesantren Darussalam, Al-Falah, dan Darul Hijrah diwujudkan melalui penerapan dual

<sup>12</sup> Alfani Daud, *ISLAM DAN MASYARAKAT BANJAR; Diskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997).

<sup>13</sup> dan Rahmadi Mujiburrahman, M. Zainal Abidin, "Ulama Banjar Kharismatik Masa Kini Di Kalimantan Selatan: Studi Terhadap Figur Guru Bachiet, Guru Danau, dan Guru Zuhdi Mujiburrahman, M. Zainal Abidin, dan Rahmadi \*\*" 11, no. 2 (2012): 65–68.

<sup>14</sup> Dike Asta Rini, Naima Audia Rahmah, dan Norsahidatun Nafisah, "Peran Pondok Pesantren Dalam Penyebaran Islam Di Kalimantan Selatan," *Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 3, no. 6 (2024): 2555–62.

<sup>15</sup> Ah Syamli dan Ahmad Faris, "Modernisasi Pesantren di Indonesia: Dialektika Antara Tradisi dan Transformasi Pendidikan Islam Kontemporer," *Jurnal Pemikiran dan Ilmu Keislaman* 8, no. 1 (2025): 157–79.

curriculum, yang memadukan kurikulum pondok (untuk nilai agama) dengan kurikulum negara (untuk nilai kebangsaan) <sup>16</sup>.

Model ini bisa disebut *hybrid curriculum*, yaitu Model perpaduan yang mengintegrasikan beberapa kurikulum yang berbeda, seperti kurikulum pesantren, kurikulum nasional, ataupun kurikulum internasional <sup>17</sup>. Ini merupakan hasil dari "negosiasi" antara kebutuhan akan rekognisi formal dari negara dan keharusan menjaga otoritas keagamaan tradisional. Pola integrasi ini terus berevolusi merespons kebijakan terbaru, seperti Kurikulum Merdeka <sup>18</sup>, namun fondasi hibridanya tetap bertahan. Meskipun beberapa penelitian telah memotret model integrasi *saat ini*, masih terdapat celah dalam melihat dinamika ini sebagai sebuah narasi *transformasi historis* yang utuh. Masih belum banyak dibahas *bagaimana proses* pergeseran dari "Masa Pesantren" (sebelum intervensi kebijakan) menjadi "Masa Kurikulum Nasional" (pasca-intervensi) terjadi secara kronologis, khususnya dalam konteks Kalimantan Selatan. Penelitian ini berfokus untuk mengisi celah tersebut. Pertanyaan utama penelitian ini adalah 'Bagaimana proses historis transformasi PAI di Kalimantan Selatan berlangsung, khususnya dalam dinamika responsnya terhadap penetrasi "Kurikulum Nasional?"' Tulisan ini ingin mengungkap bahwa transformasi PAI di Kalsel bukanlah proses asimilasi (penyerahan tradisi) ataupun resistensi (penolakan), melainkan sebuah proses "**negosiasi kurikuler**" (*curricular negotiation*) yang dinamis, meskipun dalam kasus yang berbeda masih dianggap belum optimal <sup>19</sup>. Oleh karena itu, hasil dari negosiasi ini adalah model pendidikan **hibrida**, di mana "Kurikulum Nasional" diadopsi secara formal (melalui pendirian unit madrasah) untuk memberikan legitimasi legal-formal dan mobilitas sosial, sementara "Tradisi Pesantren" tetap dipertahankan sebagai *ruh* (spirit) dan inti identitas kelembagaan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami fenomena sosial-historis secara mendalam <sup>20</sup>. Fokusnya adalah menganalisis "bagaimana" dan

<sup>16</sup> Insyirah Insyirah, "INTEGRASI NILAI-NILAI KEISLAMAN DAN NILAI-NILAI KEBANGSAAN PADA PONDOK PESANTREN DARUSSALAM MARTAPURA, PONDOK PESANTREN AL FALAH LANDASAN ULIN BANJARBARU DAN PONDOK PESANTREN DARUL HIJRAH CINDAI ALUS BANJARBARU," *PROCEEDING UMSURABAYA* 1, no. 1 (2022).

<sup>17</sup> SYAZA TIFTAZANI dan BUDI PURWOKO, "INOVASI PEMBELAJARAN MENGGUNAKAN HYBRID CURRICULUM DI AQOBAH INTERNASIONAL SCHOOL JOMBANG," *EDUCATIONAL: Jurnal Inovasi Pendidikan & Pengajaran* 4, no. 4 (15 Januari 2025): 478–90, <https://doi.org/10.51878/educational.v4i4.4164>.

<sup>18</sup> Neliwati Neliwati, Hikmah Bayani Situmorang, dan Putri Maymuhamna Rahayu, "Kebijakan Kurikulum Merdeka Belajar di Sekolah," *Jurnal Penelitian, Pendidikan Dan Pengajaran: JPPP* 4, no. 2 (2023): 117–20, [https://doi.org/https://doi.org/10.30596/jppp.v4i2.15475](https://doi.org/10.30596/jppp.v4i2.15475).

<sup>19</sup> Benaouda Bensaid, Salah Ben Tahar Machouche, dan Mustafa Tekke, "An Islamic Spiritual Alternative to Addiction Treatment and Recovery," *Al-Jami'ah* 69, no. 1 (2021): 127–62, <https://doi.org/10.14421/ajis.2021.591.127-162>.

<sup>20</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2016).

"mengapa" transformasi PAI di Kalimantan Selatan terjadi melalui analisis interpretatif. Jenis penelitian adalah studi pustaka (*library research*) dengan pendekatan historis (*historical approach*) yang dilakukan selama kurang lebih 3 bulan, yaitu dari bulan Agustus sampai dengan November 2025. Pilihan ini relevan karena fokus pada "landasan historis" dan data masa lalu<sup>21</sup>, serta bertujuan merekonstruksi narasi historis dari sumber terdokumentasi, bukan data lapangan sinkronis<sup>22</sup>.

Sumber data pada penelitian menggunakan data primer dan data sekunder, sedangkan pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi. Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yang pertama adalah tesis yang disusun oleh H Hasni Noor, H., tahun 2017 yang berjudul "Dinamika Kurikulum Pondok Pesantren di Kalimantan Selatan (Studi Pada Pondok Pesantren Darussalam Martapura, Ibnu Amin Pamangkikh, Al-Falah Banjarbaru dan Darul Ilmi Banjarbaru). Sumber data kedua adalah jurnal ilmiah yang ditulis oleh Insyirah dengan judul "Integrasi Nilai-Nilai Keislaman Dan Nilai-Nilai Kebangsaan Pada Pondok Pesantren Darussalam Martapura, Pondok Pesantren Al Falah Landasan Ulin Banjarbaru Dan Pondok Pesantren Darul Hijrah Cindai Alus Banjarbaru." *Proceeding Umsurabaya* 1, no. 1 (2022). Prosesnya meliputi penelusuran di database (Google Scholar, SINTA) dan repositori, selanjutnya dokumen-dokumen yang relevan akan diseleksi dan diarsip untuk selanjutnya diolah.

Analisis data menggabungkan analisis konten kualitatif dan analisis historis. 1) Analisis Konten Kualitatif, yaitu untuk menginterpretasi data tekstual secara sistematis, mengikuti alur interaktif yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan data<sup>23</sup>, dan 2) Analisis Historis, yaitu Membingkai analisis konten dalam alur waktu<sup>24</sup>.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis dari data pustaka, baik dokumen kebijakan, buku sejarah, penelitian dan jurnal akademis menunjukkan bahwa transformasi Pendidikan Agama Islam di Pesantren Kalimantan Selatan melalui proses evolusi panjang. Sehingga, penelitian ini membagi empat fase utama dalam merefleksikan proses negosiasi dinamis antara tradisi pesantren yang telah lama dijalankan dan intervensi negara melalui kebijakan kurikulum pendidikan nasional.

### Fase 1: Landasan Historis – Dominasi Otonomi Tradisi Pesantren (Pra-1970an)

Berdasarkan hasil kajian pustaka, sebelum era tahun 1970-an pendidikan islam di Kalimantan Selatan didominasi oleh tradisi pesantren<sup>25</sup>. Sistem ini yang kemudian

<sup>21</sup> M Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2008).

<sup>22</sup> P D R Kuntowijoyo, *Pengantar ilmu sejarah* (Yayasan Bentang Budaya, 2005).

<sup>23</sup> Matthew B Miles, A Michael Huberman, dan Johnny Saldana, "Qualitative data analysis: A methods sourcebook," (*No Title*), 2014.

<sup>24</sup> Kuntowijoyo, *Pengantar ilmu sejarah*.

<sup>25</sup> Dhofier, "Tradisi pesantren: Studi tentang pandangan hidup kyai"; Steenbrink, "Pesantren, madrasah, sekolah: pendidikan Islam dalam kurun moderen."

terwujud sebagai identitas “Islam Banjar”<sup>26</sup>, dengan karakteristik yang otonom dan terpisah dari sistem pendidikan formal, dengan ciri:

**Pertama**, sentralitas ulama dalam hal ini kiai atau Tuan Guru sebagai sebutan yang biasa digunakan di Kalimantan Selatan. Model pendidikan ini berpusat pada Tuan Guru, di mana otoritas kurikulum, metode, dan kelulusan di tangan guru. Kelulusan santri tidak bergantung pada ujian tertulis atau ijazah formal melainkan pada penilaian Tuan Guru, setiap selesai menamatkan kitab kemudian diberikan ijazah dan dilakukan selamatan<sup>27</sup>. Tujuan utama pendidikan pesantren di sini bukan untuk mobilitas sosial-ekonomi seperti mencari pekerjaan atau lainnya, melainkan untuk memperdalam ilmu agama (*tafaqquh fiddin*) dan juga regenerasi ulama yang akan melanjutkan keilmuan dan juga dakwah.

**Kedua**, kurikulum pesantren pada masa ini berfokus pada pengkajian kitab-kitab kuning (*kutub al-turats*) tentang berbagai ilmu agama islam dan bahasa arab<sup>28</sup>. Kitab-kitab ini mengacu pada standar (*kitab mu'tabarah*) dan referensinya sejalan dengan *ahlussunnah wal jamaah* madzhab Syafi'i<sup>29</sup>.

**Ketiga**, metodologi yang dipakai adalah *halaqah* (non-klasikal). Pembelajaran yang menggunakan cara *sorogan* yaitu guru membacakan kitab dan menjelaskan isinya, sedangkan santri menyimak kitabnya dan men-*dhabit* berdasarkan penjelasan guru. Ada juga cara *bandongan/wetonan* yaitu santri yang membaca bergantian dengan disimak oleh guru<sup>30</sup>.

Pusat dari tradisi ini di Kalimantan Selatan adalah Pondok Pesantren Darussalam Martapura. Pondok pesantren tertua di Kalimantan Selatan yang didirikan pada tahun 1914. Lembaga ini kemudian menjadi acuan bagi perkembangan pesantren-pesantren lain yang berdiri setelahnya di provinsi ini<sup>31</sup>. Pada era ini, pembelajaran dalam pendidikan pesantren salafi tidak mengenal pembelajaran umum seperti Matematika, Bahasa, dan Lainnya, karena dianggap tidak sesuai dengan tujuan keilmuan dan spiritual pesantren<sup>32</sup>.

## Fase 2: Katalisator Perubahan – Intervensi Politis Kurikulum Nasional (1975-1989)

Transformasi pendidikan pesantren di Kalimantan Selatan tidak serta-merta melalui dorongan internal, melainkan dipicu oleh dorongan eksternal seperti intervensi kebijakan negara. Masa orde baru ditandai dengan standarisasi politik di segala lini,

<sup>26</sup> Daud, *ISLAM DAN MASYARAKAT BANJAR; Diskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar*.

<sup>27</sup> H H Hasni Noor, “Dinamika Kurikulum Pondok Pesantren di Kalimantan Selatan (Studi Pada Pondok Pesantren Darussalam Martapura, Ibnu Amin Pamangkih, Al-Falah Banjarbaru dan Darul Ilmi Banjarbaru),” 2017, <https://idr.uin-antasari.ac.id/7754/>.

<sup>28</sup> Rouf Tamim, “Pendidikan Islam Di Indonesia (Model Pesantren Dan Madrasah),” *At-Tarbiyah: Jurnal Penelitian dan Pendidikan Agama Islam* 2, no. 1 (2024): 476–93.

<sup>29</sup> H Hasni Noor, “Dinamika Kurikulum Pondok Pesantren di Kalimantan Selatan (Studi Pada Pondok Pesantren Darussalam Martapura, Ibnu Amin Pamangkih, Al-Falah Banjarbaru dan Darul Ilmi Banjarbaru).”

<sup>30</sup> H Hasni Noor.

<sup>31</sup> H Hasni Noor.

<sup>32</sup> Tamizy Burhanudin, *Akhlik Pesantren Solusi bagi Kerusakan Akhlak* (Ittaqa Press, 2001).

termsuk pendidikan. Pada Masa ini, kurikulum pendidikan selalu mengalami perubahan hampir setiap dekade<sup>33</sup>. Di Kalimantan Selatan sendiri, pada masa ini beberapa pesantren telah melakukan pembaharuan misalnya saja pada Pesantren Darussalam Martapura yang telah memberlakukan pembelajaran madrasah atau klasikal dengan sistem kelas berjenjang<sup>34</sup>.

Katalisator utama yang menjadi pemicu transformasi sistem pendidikan pesantren adalah SKB 3 Menteri tahun 1975. Ada juga pemicu lain yang ikut mempengaruhi transformasi yaitu kebutuhan masyarakat sekitar kepada pendidikan yang semakin beragam, dalam artian tidak hanya membutuhkan pendidikan agama saja<sup>35</sup>. Kebijakan ini secara politis bagaikan “pedang bermata dua”. Di satu sisi, ia menawarkan rekognisi (penyetaraan ijazah) yang sangat didambakan komunitas madrasah agar lulusannya memiliki mobilitas sosial. Di sisi lain, kebijakan ini menuntut syarat penyetaraan kurikulum, dalam artian madrasah (MI, MTs, MA) wajib mengadopsi proporsi 70% kurikulum umum (standar Depdikbud) dan hanya 30% kurikulum agama (standar Depag).

Hal ini menjadikan pesantren-pesantren di Kalimantan Selatan berada pada posisi dilematis antara mengisolasi diri dengan mempertahankan tradisi murni namun lulusannya tidak diakui negara, dan mengakomodasi kurikulum nasional dengan resiko degradasi identitas salafnya. Intervensi ini kemudian diperkuat secara legal dan memberikan timbal balik melalui UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sisdiknas, yang secara permanen memasukkan PAI sebagai mata pelajaran wajib dalam struktur kurikulum nasional (Republik Indonesia, 1989).

### Fase 3: Respons Lokal – Negosiasi Kurikuler dan Model Hibrida di Kalsel

Analisis data pustaka menunjukkan bahwa respons pesantren di Kalsel terhadap intervensi negara ini tidak tunggal, melainkan melahirkan setidaknya dua model respons "hibrida" yang utama.

#### 3.1. Model Adaptasi Historis (*The Adaptive Model*):

Beberapa pondok pesantren, khususnya yang memulai diri dengan bentuk lembaga salafy, katakanlah seperti pondok pesantren Darussalam Martapura, tidak memilih resistensi total maupun asimilasi total. Sebaliknya, mereka melakukan strategi adaptasi yang cemerlang, yaitu menciptakan sistem ganda (*dual system*)<sup>36</sup>

Respons ini terwujud dalam: (1) Unit Salaf (Inti/Ruh): Sistem pengajian *halaqah* dan kitab kuning tradisional (non-formal) tetap dipertahankan sebagai "jantung"

<sup>33</sup> Laila Maulidiyah, Ainiyyah Yafiatuzabrina, dan Heny Kusmawati, “Perkembangan Pendidikan Indonesia Setelah Tahun 1965 Sampai Runtuhnya Orde Baru,” *EDUCATIONIST: Journal of Educational and Cultural Studies* 2, no. 1 (2023): 173–85.

<sup>34</sup> H Hasni Noor, “Dinamika Kurikulum Pondok Pesantren di Kalimantan Selatan (Studi Pada Pondok Pesantren Darussalam Martapura, Ibnu Amin Pamangkih, Al-Falah Banjarbaru dan Darul Ilmi Banjarbaru).”

<sup>35</sup> H Hasni Noor.

<sup>36</sup> Kholik dan others, *Politik Pendidikan Islam*.

pesantren dan inti identitas kelembagaannya<sup>37</sup>. (2) Unit Formal (Adaptasi/Raga): Darussalam mendirikan unit pendidikan formal (seperti MTs dan MA Muallimin) yang terdaftar di Kementerian Agama<sup>38</sup>.

Di unit formal inilah "Kurikulum Nasional" (Matematika, IPA, IPS, Bahasa Indonesia) diajarkan secara penuh sesuai standar Kemenag<sup>39</sup>. Santri di pesantren modern "diwajibkan" mengikuti kedua sistem ini: mereka bersekolah formal untuk mengejar ijazah, namun mereka mengaji kitab kuning (Salaf) untuk mengejar sanad dan barokah. Ini adalah bentuk "negosiasi kurikuler": "Kurikulum Nasional" diterima secara pragmatis sebagai "wadah", namun "Tradisi Pesantren" tidak dibuang dan tetap menjadi *ruh* utamanya<sup>40</sup>.

### **3.2. Model Integrasi Modern (*The Integrated Model*)**

Fase selanjutnya melahirkan model respons yang berbeda, yaitu lahirnya pesantren-pesantren yang sejak awal didirikan dengan model "modern-tradisionalis". Misalnya seperti Pondok Pesantren Al-Falah Banjarbaru<sup>41</sup>.

Lembaga-lembaga ini tidak mengalami "transformasi" dari *salaf* murni, melainkan didirikan dengan model integratif sejak awal. Mereka adalah "modern" dalam sistem (klasikal, berjenjang, sistematis) namun "tradisionalis" dalam konten (berbasis Aswaja NU dan kitab kuning). Mereka langsung membangun MTs dan MA yang mengikuti Kurikulum Nasional Kemenag, sambil menjalankan program diniyah (Aswaja) sebagai pengayaan wajib. Bagi pondok pesantren dengan model seperti ini, "Kurikulum Nasional" dan "Tradisi Pesantren" bukanlah dua kutub yang dinegosiasikan, melainkan dua fondasi yang sejak awal dipadukan<sup>42</sup>. Pola ini terbukti sangat adaptif dalam merespons tuntutan kurikulum baru, seperti Kurikulum Merdeka yang telah diterapkan di beberapa pondok pesantren di Indonesia<sup>43</sup>.

<sup>37</sup> Rini, Rahmah, dan Nafisah, "Peran Pondok Pesantren Dalam Penyebarluasan Islam Di Kalimantan Selatan."

<sup>38</sup> Abdul Salam dan others, "PEMIKIRAN KH BADARUDDIN TENTANG PEMBAHARUAN PENDIDIKAN DI PONDOK PESANTREN DARUSSALAM MARTAPURA," *Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman* 8, no. 1 (2009).

<sup>39</sup> Mesi Mesi, "MODEL KURIKULUM SD, MI, SMP, DAN MTS, DAN PERBEDAAN KURIKULUMNYA (SECARA SPESIFIK)," *Al-SAMBASY: Jurnal Kajian Pendidikan* 1, no. 1 (2024): 8–13, <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.16916409>.

<sup>40</sup> Bensaid, Machouche, dan Tekke, "An Islamic Spiritual Alternative to Addiction Treatment and Recovery."

<sup>41</sup> Rafi'atun Najah Qomariah, Wa Muna, dan Mursyidatul Awaliyah, "Sistem Pendidikan Islam Pondok Pesantren Al-Falah Banjarbaru Kalimantan Selatan (Integrasi Sekolah dan Pesantren)," *Tarbawi* 9, no. 02 (2021): 28–46, <https://doi.org/https://doi.org/10.62748/tarbawi.v9i02.66>.

<sup>42</sup> Lucia Maduningtias, "Manajemen integrasi kurikulum pesantren dan nasional untuk meningkatkan mutu lulusan pesantren," *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 2022, 323–31, <https://doi.org/https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v5i4.378>.

<sup>43</sup> Yunita Yunita dkk., "Implementasi kurikulum merdeka belajar," *Jambura Journal of Educational Management*, 2023, 16–25, <https://doi.org/https://doi.org/10.37411/jjem.v4i1.2122>.

#### Fase 4: Wajah Baru PAI di Kalsel – Hibriditas sebagai Konsensus

Keberadaan Pondok Pesantren Modern di Kalimantan Selatan saat ini membuktikan bahwa proses internal transformasi kurikulum, di mana integrasi ilmu modern dan agama terbukti berhasil meningkatkan kualitas santri agar mampu menjawab tantangan global. Kunci keberhasilan transformasi ini adalah kemampuan pesantren untuk bersaing "**tanpa kehilangan jati dirinya**"<sup>44</sup>. Fenomena internal inilah yang kemudian dapat disebut sebagai sebuah tren yang telah mengubah lanskap PAI di Kalsel secara makro. Dengan kata lain, "Kurikulum Nasional" telah berhasil diterima luas<sup>45</sup>, **bukan sebagai pengganti** kurikulum tradisional, melainkan justru sebagai "**mitra baru**" yang kini hidup berdampingan dalam satu atap kelembagaan pesantren.

Teori dari Bhabha, H. K. (1994) turut menjelaskan bagaimana Pesantren Modern menciptakan identitas baru dengan menggabungkan tradisi dan modernitas yang menciptakan identitas yang baru dan unik<sup>46</sup>. Selain itu, mengacu pada teori *Glocalization* yang disampaikan oleh Robertson (1992), maka tuntutan global untuk melakukan adaptasi namun tetap tidak meninggalkan konteks lokal telah dilakukan dengan baik oleh ponpes-ponpes di Kalimantan Selatan saat ini<sup>47</sup>.

Analisis akhir menyimpulkan bahwa telah terjadi sebuah konsensus hibrida. Telah terbentuk pembagian peran yang jelas:

1. "Tradisi Pesantren" (diwakili oleh otoritas Tuan Guru, *diniyah*, dan kajian kitab kuning) berfungsi sebagai pemberi legitimasi sosial-keagamaan dan penjaga *ruh* (spirit) keislaman Banjar.
2. "Kurikulum Nasional" (diwakili oleh ijazah, akreditasi, dan pelajaran umum) berfungsi sebagai pemberi legitimasi formal-struktural dan penyedia mobilitas sosial-ekonomi bagi para santri<sup>48</sup>.

Adanya UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren tidak hanya memberikan pengakuan formal (rekognisi) dari negara terhadap pesantren sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat<sup>49</sup>, namun memunculkan pengakuan bahwa tradisi pesantren merupakan bagian dari kurikulum nasional itu

<sup>44</sup> Diah Ayu Puspita Sari dan others, "Transformasi Kurikulum di Pondok Pesantren Modern: Integrasi Pendidikan Islam dan Umum dalam Era Globalisasi," *Didaktika: Jurnal Kependidikan* 14, no. 1 Februari (2025): 1407–16, <https://doi.org/10.58230/27454312.1532>.

<sup>45</sup> Suci Nur Atikah, Umi Fitriyah, dan Winda Zulfatun Nikmah, "Integrasi Kurikulum Nasional dalam Sistem Pendidikan Pesantren di Indonesia," *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities* 24 (2025): 611–19, [https://doi.org/10.31943/jurnal\\_risalah.v10i4.1210](https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v10i4.1210).

<sup>46</sup> Homi K Bhabha, "The postcolonial and the postmodern: The question of agency," *The location of culture*, 1994, 171–97.

<sup>47</sup> Roland Robertson, "Globalization: Social theory and global culture" (Sage, 1992).

<sup>48</sup> Maduningtias, "Manajemen integrasi kurikulum pesantren dan nasional untuk meningkatkan mutu lulusan pesantren."

<sup>49</sup> Itsna Noor Laila, "Eksistensi, Problematika dan Titik Temu Pesantren Dalam Perkembangan Pendidikan di Indonesia," *FATAWA: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 5, no. 2 (2025): 122–36, <https://doi.org/10.37812/fatawa.v5i2.2091>.

sendiri. Hal ini dibuktikan dengan adanya afirmasi dan rekognisi terhadap model pendidikan *salaf* (seperti *Muadalah* dan *Ma'had Aly*), yang secara efektif mengakui bahwa "Tradisi Pesantren" adalah bagian dari "Kurikulum Nasional" itu sendiri.

## KESIMPULAN

Proses historis transformasi Pendidikan Agama Islam (PAI) di Kalimantan Selatan (Kalsel) dalam merespons penetrasi Kurikulum Nasional bukanlah berbentuk asimilasi (penyerahan tradisi) ataupun resistensi (penolakan), melainkan sebuah "negosiasi kurikuler" (curricular negotiation) yang dinamis. Proses ini dipicu oleh intervensi negara (khususnya SKB 3 Menteri 1975) yang menawarkan rekognisi ijazah dengan syarat adopsi kurikulum umum. Pesantren di Kalsel merespons secara pragmatis dengan menciptakan model pendidikan hibrida untuk menjembatani tuntutan negara dan pelestarian tradisi.

Negosiasi ini melahirkan dua model utama:

1. Model Adaptasi Historis (Dual System): Pesantren salaf (contoh: Darussalam Martapura) mempertahankan tradisi kitab kuning sebagai "ruh" (inti identitas) sambil mendirikan unit formal (MTs/MA) yang mengadopsi Kurikulum Nasional sebagai "raga" (wadah legal-formal).
2. Model Integrasi Modern: Pesantren baru (contoh: Al-Falah Banjarbaru) sejak awal didirikan dengan memadukan sistem klasikal-modern (Kurikulum Nasional) dengan konten tradisionalis (Aswaja dan kitab kuning).

Hasil akhir dari transformasi ini adalah terbentuknya konsensus hibrida yang stabil: Tradisi Pesantren dipertahankan sebagai penjaga ruh dan legitimasi sosial-keagamaan, sementara Kurikulum Nasional diadopsi sebagai penyedia legitimasi legal-struktural dan sarana mobilitas sosial-ekonomi bagi santri.

## REFERENSI

- Alfarisi, Salman, dan Yunus Abu Bakar. "SKB 3 menteri dan implikasinya pada pendidikan Islam." *Al-Fikr: Jurnal Pendidikan Islam* 8, no. 1 (2022): 1–9.
- Amrullah, Amrullah. "Eksistensi Pendidikan Islam di Era Perkembangan Teknologi dan Informasi." *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI* 9, no. 2 (2022): 234–47. <https://doi.org/https://doi.org/10.69896/modeling.v9i2.1241>.
- Atikah, Suci Nur, Umi Fitriyah, dan Winda Zulfatun Nikmah. "Integrasi Kurikulum Nasional dalam Sistem Pendidikan Pesantren di Indonesia." *Proceedings Series on Social Sciences \& Humanities* 24 (2025): 611–19. [https://doi.org/https://doi.org/10.31943/jurnal\\_risalah.v10i4.1210](https://doi.org/https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v10i4.1210).
- Audi, Achmad Audi Pratama Jojang, Tasman Hamami, Moh Luthfih Gonibala, dan Farhan Moh Fahrerozi Bonde. "Perkembangan dan Problematika Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Indonesia." *Risâlah Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 10, no. 4

- (2024): 1648–64.
- Azra, Azyumardi. *Pendidikan Islam: tradisi dan modernisasi di tengah tantangan milenium III*. Prenada Media, 2019.
- Bensaid, Benaouda, Salah Ben Tahar Machouche, dan Mustafa Tekke. “An Islamic Spiritual Alternative to Addiction Treatment and Recovery.” *Al-Jami’ah* 69, no. 1 (2021): 127–62. <https://doi.org/10.14421/ajis.2021.591.127-162>.
- Bhabha, Homi K. “The postcolonial and the postmodern: The question of agency.” *The location of culture*, 1994, 171–97.
- Burhanudin, Tamizy. *Akhlik Pesantren Solusi bagi Kerusakan Akhlak*. Ittaqa Press, 2001.
- Daud, Alfani. *ISLAM DAN MASYARAKAT BANJAR; Diskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997.
- Dhofier, Zamakhsyari. “Tradisi pesantren: Studi tentang pandangan hidup kyai.” (*No Title*), 1982.
- H Hasni Noor, H. “Dinamika Kurikulum Pondok Pesantren di Kalimantan Selatan (Studi Pada Pondok Pesantren Darussalam Martapura, Ibnu Amin Pamangkikh, Al-Falah Banjarbaru dan Darul Ilmi Banjarbaru),” 2017. <https://idr.uin-antasari.ac.id/7754/>.
- Indonesia, Republik. Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (1989).
- . Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (2003).
- Insyirah, Insyirah. “INTEGRASI NILAI-NILAI KEISLAMAN DAN NILAI-NILAI KEBANGSAAN PADA PONDOK PESANTREN DARUSSALAM MARTAPURA, PONDOK PESANTREN AL FALAH LANDASAN ULIN BANJARBARU DAN PONDOK PESANTREN DARUL HIJRAH CINDAI ALUS BANJARBARU.” *PROCEEDING UMSURABAYA* 1, no. 1 (2022).
- Kholik, Muhammad, dan others. *Politik Pendidikan Islam*. AE Publishing, 2025.
- Kuntowijoyo, P D R. *Pengantar ilmu sejarah*. Yayasan Bentang Budaya, 2005.
- Laila, Itsna Noor. “Eksistensi, Problematika dan Titik Temu Pesantren Dalam Perkembangan Pendidikan di Indonesia.” *FATAWA: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 5, no. 2 (2025): 122–36. <https://doi.org/https://doi.org/10.37812/fatawa.v5i2.2091>.
- Maduningtias, Lucia. “Manajemen integrasi kurikulum pesantren dan nasional untuk meningkatkan mutu lulusan pesantren.” *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 2022, 323–31. <https://doi.org/https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v5i4.378>.
- Mauludiyah, Laila, Ainiyyah Yafiatuzabrina, dan Heny Kusmawati. “Perkembangan Pendidikan Indonesia Setelah Tahun 1965 Sampai Runtuhnya Orde Baru.” *EDUCATIONIST: Journal of Educational and Cultural Studies* 2, no. 1 (2023): 173–85.
- Mesi, Mesi. “MODEL KURIKULUM SD, MI, SMP, DAN MTS, DAN PERBEDAAN KURIKULUMNYA (SECARA SPESIFIK).” *Al-SAMBASY: Jurnal Kajian Pendidikan* 1, no. 1 (2024): 8–13. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.16916409>.
- Miles, Matthew B, A Michael Huberman, dan Johnny Saldana. “Qualitative data analysis: A methods sourcebook.” (*No Title*), 2014.

- Mujiburrahman, M. Zainal Abidin, dan Rahmadi. "Ulama Banjar Kharismatik Masa Kini Di Kalimantan Selatan: Studi Terhadap Figur Guru Bachiet, Guru Danau, dan Guru Zuhdi Mujiburrahman, M. Zainal Abidin, dan Rahmadi \*" 11, no. 2 (2012): 65–68.
- Nata, H Abuddin. *Manajemen pendidikan: Mengatasi kelemahan pendidikan Islam di Indonesia*. Kencana, 2012.
- Neliwati, Neliwati, Hikmah Bayani Situmorang, dan Putri Maymuhamna Rahayu. "Kebijakan Kurikulum Merdeka Belajar di Sekolah." *Jurnal Penelitian, Pendidikan Dan Pengajaran: JPPP* 4, no. 2 (2023): 117–20. <https://doi.org/https://doi.org/10.30596/jppp.v4i2.15475>.
- Nizar, Samsul. *Sejarah Pendidikan Islam : Menelusuri Jejak Sejarah Pendidikan Era Rasulullah Sampai Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Qomariah, Rafi'atun Najah, Wa Muna, dan Mursyidatul Awaliyah. "Sistem Pendidikan Islam Pondok Pesantren Al-Falah Banjarbaru Kalimantan Selatan (Integrasi Sekolah dan Pesantren)." *Tarbawi* 9, no. 02 (2021): 28–46. <https://doi.org/https://doi.org/10.62748/tarbawi.v9i02.66>.
- Rini, Dike Asta, Naima Audia Rahmah, dan Norsahidatun Nafisah. "Peran Pondok Pesantren Dalam Penyebaran Islam Di Kalimantan Selatan." *Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 3, no. 6 (2024): 2555–62.
- Robertson, Roland. "Globalization: Social theory and global culture." Sage, 1992.
- Salam, Abdul, dan others. "PEMIKIRAN KH BADARUDDIN TENTANG PEMBAHARUAN PENDIDIKAN DI PONDOK PESANTREN DARUSSALAM MARTAPURA." *Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman* 8, no. 1 (2009).
- Sari, Diah Ayu Puspita, dan others. "Transformasi Kurikulum di Pondok Pesantren Modern: Integrasi Pendidikan Islam dan Umum dalam Era Globalisasi." *Didaktika: Jurnal Kependidikan* 14, no. 1 Februari (2025): 1407–16. <https://doi.org/https://doi.org/10.58230/27454312.1532>.
- Steenbrink, Karel A. "Pesantren, madrasah, sekolah: pendidikan Islam dalam kurun moderen." (*No Title*), 1986.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Syamli, Ah, dan Ahmad Faris. "Modernisasi Pesantren di Indonesia: Dialektika Antara Tradisi dan Transformasi Pendidikan Islam Kontemporer." *Jurnal Pemikiran dan Ilmu Keislaman* 8, no. 1 (2025): 157–79.
- Tamim, Rouf. "Pendidikan Islam Di Indonesia (Model Pesantren Dan Madrasah)." *At-Tarbiyah: Jurnal Penelitian dan Pendidikan Agama Islam* 2, no. 1 (2024): 476–93.
- TIFTAZANI, SYAZA, dan BUDI PURWOKO. "INOVASI PEMBELAJARAN MENGGUNAKAN HYBRID CURRICULUM DI AQOBAH INTERNASIONAL SCHOOL JOMBANG." *EDUCATIONAL : Jurnal Inovasi Pendidikan & Pengajaran* 4, no. 4 (15 Januari 2025): 478–90. <https://doi.org/10.51878/educational.v4i4.4164>.
- Yunita, Yunita, Ahmad Zainuri, Ibrahim Ibrahim, Ahmad Zulfi, dan Mulyadi Mulyadi. "Implementasi kurikulum merdeka belajar." *Jambura Journal of Educational*

- Management, 2023, 16–25.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.37411/jjem.v4i1.2122>.
- Zed, M. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2008.
- Zulkifli, Zulkifli, M Khatami, dan others. "Negosiasi Pendidikan Islam Dan Teknologi Terhadap Perubahan Global 'Sebuah Responisasi Terhadap Era Revolusi Industri 4.0.'" *Darajat: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 6, no. 2 (2023): 103–12.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.58518/darajat.v6i2.1821>.